Ji@P Vol 15 No. 2 2026 p-ISSN: 2355-4223
Bulan Juni 2026 e-ISSN: 2808-0211

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN WONOGIRI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029

Irawan Ary Wibowo

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menuju Pemilihan Umum Tahun 2029. Urgensi penelitian ditunjukkan oleh data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang mencatat 177.289 pemilih baru yang didominasi Generasi Z atau sekitar 20,85% dari keseluruhan pemilih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive yang meliputi unsur KPU, pelaksana teknis, sekolah, dan pemilih pemula. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Kerangka analisis menggunakan teori manajemen strategis organisasi publik Richard M. Walker yang meliputi orientasi inovasi (prospector), orientasi stabilitas (defender), analisis lingkungan, respons terhadap perubahan, dan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU Wonogiri bersifat adaptif, inovatif, kolaboratif, dan tetap berlandaskan kepastian prosedural. Strategi diwujudkan melalui Sabdatama, Dhayohe KPU, KPU Goes to School, pendampingan Pemilihan Ketua OSIS, simulasi pemungutan suara, media sosial, layanan Cek DPT Online, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi tersebut membentuk pendekatan komunikasi hibrida yang menggabungkan tatap muka, praktik demokrasi, media digital, validasi data pemilih, dan kemitraan. Temuan lebih tepat dipahami sebagai peningkatan kesiapan, pengetahuan, kesadaran, akses informasi, dan kesiapan administratif pemilih pemula menuju Pemilu 2029, karena penelitian dilakukan sebelum pemilu berlangsung.
Kata kunci: Administrasi Publik; KPU Kabupaten Wonogiri; pemilih pemula; manajemen strategis; Richard M. Walker; collaborative governance

ABSTRACT

This study analyzes the strategy of the General Election Commission (KPU) of Wonogiri Regency to increase first-time voter participation toward the 2029 General Election. Continuous Voter Data Updating (PDPB) data for the first semester of 2026 recorded 177,289 new voters, predominantly Generation Z, or approximately 20.85% of the electorate. This study employed a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively from KPU officials, technical implementers, schools, and first-time voters. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, with source, technique, and time triangulation used to ensure data credibility. Richard M. Walker's public-sector strategic management framework was applied through five dimensions: prospector innovation orientation, defender stability orientation, environmental analysis, responsiveness to change, and organizational performance. The findings indicate that KPU Kabupaten Wonogiri implemented an adaptive,

innovative, collaborative, and procedurally grounded strategy through Sabdatama, Dhayohe KPU, KPU Goes to School, OSIS election assistance, voting simulations, social media, voter-data checking services, and cross-sector collaboration. The strategy forms a hybrid communication approach integrating face-to-face education, democratic practice, digital media, voter-data validation, and partnerships. The findings should be interpreted as improvements in first-time voters' readiness, knowledge, awareness, information access, and administrative preparedness toward 2029, rather than evidence of increased turnout in the 2029 election, which had not yet taken place when the research was conducted.
Keywords: Public Administration; KPU Kabupaten Wonogiri; first-time voters; strategic management; Richard M. Walker; collaborative governance

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi modern sekaligus mekanisme penyaluran kedaulatan rakyat. Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara memastikan warga memperoleh informasi, akses, dan pelayanan yang memungkinkan mereka menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pemilih pemula merupakan kelompok strategis karena pengalaman pertama mereka dalam menggunakan hak pilih dapat menjadi pintu masuk pembentukan budaya politik dan partisipasi demokratis jangka panjang.

Pemilih pemula dalam penelitian ini dipahami sebagai warga negara yang untuk pertama kali menggunakan hak pilih atau baru memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Kelompok ini sebagian besar berasal dari Generasi Z yang akrab dengan teknologi digital, memperoleh informasi secara cepat melalui media sosial, tetapi pada saat yang sama menghadapi kerentanan terhadap disinformasi, apatisme politik, dan keterbatasan pengalaman praktis mengenai prosedur pemilu. Karena itu, pendekatan pendidikan pemilih perlu bergerak dari komunikasi satu arah menuju strategi yang lebih interaktif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Urgensi tersebut terlihat di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data PDPB Semester I Tahun 2026 yang digunakan dalam tesis, pemilih baru yang didominasi Generasi Z mencapai 177.289 orang atau sekitar 20,85% dari keseluruhan pemilih. Pada saat yang sama, partisipasi pemilih secara keseluruhan tercatat meningkat dari 71,3% pada Pemilu 2014 menjadi 76,5% pada 2019 dan 78,2% pada 2024. Namun, evaluasi KPU Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa keterlibatan pemilih pemula di sejumlah kecamatan belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi agregat belum

otomatis menjamin kesiapan dan keterlibatan kelompok pemilih pemula.

Tantangan Wonogiri juga bersifat spasial dan administratif. Wilayah Kabupaten Wonogiri luas, terdiri atas 25 kecamatan, dengan karakter geografis perbukitan, kawasan karst, wilayah terpencil, dan zona dengan keterbatasan jaringan komunikasi. Di sisi lain, sebagian pemilih pemula setelah lulus sekolah melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar daerah. Persoalan perekaman KTP-el dan perubahan domisili dapat menyebabkan pemilih yang secara de jure telah memenuhi syarat belum sepenuhnya siap secara administratif. Dengan demikian, strategi peningkatan partisipasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola pemilu dan pelayanan publik, bukan sekadar kegiatan sosialisasi.

Perspektif manajemen strategis organisasi publik Richard M. Walker digunakan karena menempatkan kesesuaian orientasi strategis dengan lingkungan sebagai bagian penting dari kinerja organisasi publik. Lima dimensi yang digunakan ialah orientasi inovasi (prospector), orientasi stabilitas (defender), analisis lingkungan, respons terhadap perubahan, dan kinerja organisasi. Kerangka ini memungkinkan penelitian melihat bagaimana KPU mengombinasikan inovasi dengan kepastian prosedural, membaca karakter pemilih pemula, menyesuaikan program terhadap perubahan, dan menghubungkan strategi dengan hasil pelayanan.

Penelitian ini juga menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dari strategi. KPU tidak memiliki kapasitas tunggal untuk menjangkau seluruh sekolah, komunitas, dan wilayah geografis Wonogiri. Karena itu diperlukan hubungan dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi kepemudaan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan collaborative governance yang menempatkan kerja sama lintas sektor sebagai mekanisme untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas dalam mencapai tujuan publik.

Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana strategi KPU Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2029. Tujuan penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan strategi tersebut dari perspektif manajemen strategis organisasi publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen strategis organisasi publik dipahami sebagai proses memilih orientasi strategis yang sesuai dengan lingkungan untuk meningkatkan kinerja

pelayanan publik (Walker, 2013). Dalam kerangka Miles dan Snow yang digunakan Walker, organisasi dapat menunjukkan orientasi prospector maupun defender. Prospector menekankan pencarian peluang, inovasi, penggunaan metode baru, dan perluasan jangkauan pelayanan. Defender menekankan stabilitas, konsistensi, efisiensi, kepastian prosedur, dan keberlanjutan pelayanan. Keduanya tidak harus dipertentangkan; organisasi publik dapat menggabungkan inovasi dengan stabilitas sesuai kebutuhan lingkungannya.

Analisis lingkungan diperlukan agar strategi tidak diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik kelompok sasaran. Lingkungan mencakup kondisi internal dan eksternal, antara lain sumber daya organisasi, karakter sosial masyarakat, perkembangan teknologi, kondisi geografis, serta perubahan perilaku pengguna layanan. Respons terhadap perubahan kemudian menunjukkan kemampuan organisasi melakukan penyesuaian terhadap perubahan pola informasi, kebutuhan masyarakat, dan munculnya persoalan baru. Kinerja organisasi dipahami bukan hanya sebagai hasil akhir kuantitatif, tetapi juga efektivitas program, kualitas pelayanan, jangkauan kelompok sasaran, kepuasan masyarakat, dan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks pemilu, electoral governance mencakup aturan, kelembagaan, proses administrasi, perlindungan hak pilih, serta mekanisme yang memungkinkan pemilu berlangsung demokratis dan kredibel. Pendidikan pemilih menjadi salah satu bagian penting karena pemilih perlu memahami hak dan kewajiban, prosedur pemungutan suara, serta pentingnya partisipasi. Partisipasi politik sendiri merupakan keterlibatan warga dalam proses politik; dalam konteks pemilu diwujudkan antara lain melalui penggunaan hak suara. Surbakti (2010) menempatkan kesadaran politik, pendidikan politik, sosialisasi, kepercayaan terhadap penyelenggara, dan akses informasi sebagai faktor yang berkaitan dengan partisipasi pemilih.

Collaborative governance memperluas analisis dari organisasi tunggal ke hubungan antarpemangku kepentingan. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan kolaborasi sebagai proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan lembaga pemerintah dan aktor nonpemerintah melalui dialog dan kerja sama. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menekankan keterikatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Dalam penelitian ini, perspektif tersebut membantu menjelaskan kerja sama KPU dengan sekolah, pemerintah daerah, dan

aktor lain dalam pendidikan pemilih, administrasi data pemilih, komunikasi publik, dan penguatan literasi demokrasi.

Berdasarkan landasan tersebut, strategi KPU Kabupaten Wonogiri dianalisis sebagai satu sistem yang menghubungkan lima dimensi Walker dengan kebutuhan pemilih pemula. Orientasi inovasi dipakai untuk melihat pembaruan metode dan media pendidikan pemilih; orientasi stabilitas untuk melihat kepastian prosedur dan perlindungan hak pilih; analisis lingkungan untuk melihat pemetaan karakter, wilayah, dan hambatan; respons terhadap perubahan untuk melihat kemampuan adaptasi; sedangkan kinerja organisasi untuk melihat perubahan pengetahuan, kesadaran, jangkauan layanan, dan kesiapan administratif pemilih pemula.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi yang dijalankan KPU Kabupaten Wonogiri serta pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan pemilih pemula. Lokus penelitian adalah KPU Kabupaten Wonogiri dengan keterlibatan sekolah sebagai salah satu lingkungan utama pemilih pemula.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap strategi yang diteliti. Informan mencakup Ketua KPU Kabupaten Wonogiri sebagai unsur pengambil kebijakan, Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana teknis, perwakilan kepala sekolah sebagai mitra, serta pemilih pemula sebagai kelompok sasaran. Susunan informan tersebut dimaksudkan untuk mempertemukan perspektif perumus kebijakan, pelaksana, mitra, dan penerima manfaat.

Wawancara digunakan untuk menggali arah kebijakan, bentuk program, pemilihan media, koordinasi, hambatan, dan evaluasi. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pendidikan pemilih dan bentuk layanan yang berkaitan dengan pemilih pemula. Dokumentasi meliputi dokumen perencanaan, laporan kegiatan, materi publikasi, serta data kepemiluan yang relevan. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi yang berlangsung secara interaktif dan berulang. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menuju Pemilu 2029 berkembang dalam pola yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan tetap berorientasi pada kepastian prosedural. Strategi tidak diarahkan hanya untuk mendorong kehadiran pemilih di TPS, tetapi juga membangun kesiapan pengetahuan, kesadaran demokrasi, akses informasi, dan kepastian administratif sejak sebelum tahapan pemilu.

Pertama, orientasi inovasi (prospector) terlihat pada perubahan metode pendidikan pemilih. KPU mengembangkan Sabdatama, Dhayohe KPU, KPU Goes to School/Campus, Kelas Demokrasi dan Guru Tamu, pendampingan Pemilihan Ketua OSIS, simulasi pemungutan suara, kuis interaktif, video edukasi, serta pemanfaatan media sosial. Program tersebut mengubah pendidikan pemilih dari model ceramah menjadi pengalaman belajar yang memungkinkan peserta bertanya, berdiskusi, dan mempraktikkan proses demokrasi.

Sabdatama memberi ruang bagi KPU untuk hadir di lingkungan sekolah, sedangkan Dhayohe KPU memberi kesempatan pelajar mengunjungi kantor KPU dan memperoleh pengalaman mengenai sejarah pemilu serta proses penyelenggaraannya. Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS menjadikan praktik demokrasi di sekolah sebagai media pembelajaran. Simulasi pemungutan suara dan kuis digital seperti Kahoot membantu peserta memahami prosedur secara lebih konkret. Penggunaan Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, podcast, infografis, dan video pendek memperluas kanal komunikasi kepada kelompok yang sehari-hari menggunakan media digital.

Kedua, orientasi stabilitas (defender) tampak pada upaya KPU mempertahankan kepastian hukum, netralitas, SOP, pembagian tugas, dokumentasi, dan evaluasi program. Inovasi tidak ditempatkan di luar prosedur kelembagaan, tetapi dilaksanakan dalam kerangka regulasi dan pertanggungjawaban organisasi. Stabilitas juga diwujudkan melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan serta koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan pendidikan pemilih di sekolah juga dihubungkan dengan kesadaran administratif, termasuk pengecekan status data pemilih melalui Cek DPT Online.

Ketiga, analisis lingkungan menunjukkan bahwa KPU telah mempertimbangkan karakter pemilih pemula sebagai kelompok yang dekat dengan teknologi, menyukai informasi singkat, visual, dan interaktif. Namun,

lingkungan sasaran tidak homogen. Sebagian pemilih masih memiliki minat politik yang rendah, akses informasi di sejumlah wilayah tidak merata, kondisi geografis menjadi hambatan jangkauan, dan sebagian pemilih akan berpindah karena kuliah atau bekerja di luar daerah. Karena itu, strategi perlu membedakan metode dan kanal sesuai kondisi kelompok dan wilayah.

Keempat, respons terhadap perubahan terlihat dari kemampuan KPU menggabungkan komunikasi tatap muka dengan komunikasi digital. Tatap muka tetap dipertahankan karena memberi ruang dialog dan pemahaman mendalam, sementara media digital digunakan untuk memperluas jangkauan dan menyesuaikan pola konsumsi informasi generasi muda. Respons terhadap hoaks dan disinformasi dilakukan melalui klarifikasi kanal resmi, literasi digital, forum edukasi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan. Evaluasi pascakegiatan juga digunakan untuk memperbaiki materi, metode, waktu, dan sasaran.

Kelima, kinerja organisasi terlihat dari perubahan pada aspek pengetahuan, pemahaman, antusiasme, dan kesadaran pemilih pemula. Informan dari sekolah dan pemilih pemula menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dan simulasi membantu memahami hak dan kewajiban, proses pemilu, serta cara memastikan status data pemilih. KPU juga menggunakan masukan peserta, forum diskusi, evaluasi kegiatan, dan kuesioner untuk menilai kualitas layanan. Dalam wawancara penelitian, KPU menyebut indeks kepuasan masyarakat untuk layanan pendidikan pemilih sebesar 82,31%.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada tahap penelitian lebih tepat dilihat sebagai kinerja antara menuju Pemilu 2029. Penelitian dilaksanakan pada 2026, sedangkan pemilu yang menjadi orientasi strategi berlangsung pada 2029. Karena itu, temuan tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa strategi telah meningkatkan angka partisipasi Pemilu 2029. Indikator yang dapat diamati adalah kesiapan, pengetahuan, kesadaran, akses informasi, dan kesiapan administratif pemilih pemula.

Kolaborasi menjadi penguat seluruh dimensi strategi. KPU membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Kementerian Agama, BPS, dan sejumlah OPD, serta mengembangkan hubungan dengan sekolah dan organisasi kepemudaan. Kolaborasi digunakan untuk memperluas jangkauan pendidikan pemilih, mendukung akurasi data, menghubungkan pendidikan pemilih dengan layanan perekaman KTP-el, dan

memperkuat komunikasi publik. Dengan keterbatasan sumber daya internal, kemitraan memungkinkan KPU menggabungkan kapasitas organisasi dengan sumber daya aktor lain.

Secara keseluruhan, lima dimensi Walker bekerja secara saling terkait. Inovasi menyediakan metode yang sesuai dengan karakter pemilih pemula; stabilitas memastikan inovasi tetap akuntabel dan melindungi hak pilih; analisis lingkungan menentukan sasaran dan bentuk intervensi; respons terhadap perubahan menjaga relevansi strategi; dan kinerja menunjukkan hasil antara yang dapat diamati sebelum pemilu berlangsung. Pola tersebut menghasilkan pendekatan komunikasi hibrida yang mengintegrasikan pendidikan langsung, praktik demokrasi, media digital, validasi data pemilih, dan kolaborasi.

Tabel 1. Ringkasan Strategi KPU Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Dimensi Walker

Dimensi	Temuan Utama	Bentuk Strategi
Prospector	Inovasi pendidikan pemilih dan media	Sabdatama, Dhayohe KPU, KPU Goes to School, Pilketos, simulasi, kuis, media sosial
Defender	Kepastian prosedur dan perlindungan hak pilih	SOP, netralitas, PDPB, koordinasi administrasi, Cek DPT Online
Analisis lingkungan	Pemetaan karakter Gen Z dan hambatan spasial/administrative	Segmentasi sasaran, penyesuaian media, perhatian pada mobilitas pemilih
Respons perubahan	Adaptasi kanal komunikasi dan isu digital	Komunikasi hibrida, literasi digital, anti-hoaks, evaluasi
Kinerja organisasi	Peningkatan kesiapan dan kualitas layanan	Pengetahuan, kesadaran, akses informasi, kesiapan administratif, IKM

V. KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa strategi KPU Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula menuju Pemilu 2029 menunjukkan karakter adaptif, inovatif, kolaboratif, dan tetap berlandaskan kepastian prosedural. Berdasarkan lima dimensi manajemen strategis Richard M. Walker, strategi tersebut diwujudkan melalui: (1) orientasi inovasi berupa pendidikan pemilih interaktif, Sabdatama, Dhayohe KPU, KPU Goes to School/Campus, pendampingan Pemilihan Ketua OSIS, simulasi, kuis, dan media digital; (2) orientasi stabilitas melalui kepatuhan regulasi, SOP, netralitas, pemutakhiran data pemilih, dan koordinasi administrasi; (3) analisis lingkungan yang memperhatikan karakter Gen Z, kondisi geografis, keterbatasan akses, apatisme, dan mobilitas pemilih; (4) respons terhadap perubahan melalui komunikasi hibrida, literasi digital, penanganan disinformasi,

dan evaluasi; serta (5) kinerja organisasi yang terlihat dari peningkatan pengetahuan, pemahaman, antusiasme, kesadaran, akses informasi, dan kesiapan administratif.

Strategi tersebut diperkuat oleh collaborative governance dengan sekolah, pemerintah daerah, OPD, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi antara pendidikan pemilih, praktik demokrasi, layanan administrasi, komunikasi digital, dan kolaborasi menghasilkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kehadiran di TPS, tetapi pada pembentukan partisipasi politik yang substantif dan berkelanjutan. Namun, karena penelitian dilakukan pada 2026 sementara Pemilu 2029 belum berlangsung, temuan tidak dapat dipakai untuk menyatakan adanya peningkatan angka partisipasi Pemilu 2029.

KPU Kabupaten Wonogiri disarankan mempertahankan program pendidikan pemilih yang interaktif dan melaksanakannya secara berkelanjutan, memperkuat konten TikTok, Instagram, YouTube, podcast, dan kuis digital yang sesuai karakter Generasi Z, serta meningkatkan literasi anti-hoaks dan disinformasi. Pemutakhiran data pemilih perlu terus diperkuat melalui koordinasi dengan Disdukcapil, sekolah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain. Edukasi Cek DPT Online dan mekanisme pindah memilih perlu dilakukan lebih awal, terutama bagi pemilih yang berpotensi kuliah atau bekerja di luar daerah. Kolaborasi lintas sektor dan evaluasi berbasis umpan balik juga perlu dipertahankan agar strategi dapat terus disesuaikan dengan perubahan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Bryson, J. M. (2018). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (5th ed.). John Wiley & Sons.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.

David, F. R., & David, F. R. (2016). Strategic Management: A Competitive Advantage Approach (16th ed.). Pearson.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe.

Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper and Row.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29.

Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. Holt, Rinehart and Winston.

Huntington, S. P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press.

Huxham, C., & Vangen, S. (2005). Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage. Routledge.

Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press.

Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and Gratifications Research. Public Opinion Quarterly.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-Metode (T. R. Rohidi, Penerj.). UI-Press.

Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge University Press.

Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press.

Prasetyo, D., & Handayani, L. (2023). Collaborative Governance dalam Pendidikan Pemilih Pemula pada Pemilu di Jawa Tengah. Jurnal Administrasi Publik dan Governance, 7(1).

Pratama, F., Hermawan, I., & Sulistyowati, R. (2024). Electoral Governance: Evaluasi Akurasi Administrasi Hak Pilih Kelompok Marjinal Pasca-Kelulusan Sekolah Menengah. Jurnal Administrasi Publik Publikasi, 8(3), 210–226.

Rizky Ardiansyah, M. (2024). Digital Political Engagement Generasi Z dalam Pemilu Indonesia. Jurnal Politik Digital Indonesia, 3(1).

Schedler, A. (2013). The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism. Oxford University Press.

Siagian, S. P. (2004). Manajemen Strategik. Bumi Aksara.

Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Grasindo.

Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. Public Administration Review, 66(s1), 20–32.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). Pemerintah Republik Indonesia.

Walker, R. M. (2013). Strategic management and performance in public organizations: Findings from the Miles and Snow framework. Public Administration Review, 73(5), 675–685.

Wulandari, S., & Setiawan, B. (2025). Collaborative Governance Regime (CGR) dalam Menghadapi Badai Disinformasi Digital pada Pemilih Pemula. Jurnal Kebijakan Demokratis, 10(2), 189–205.